

Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kebumen

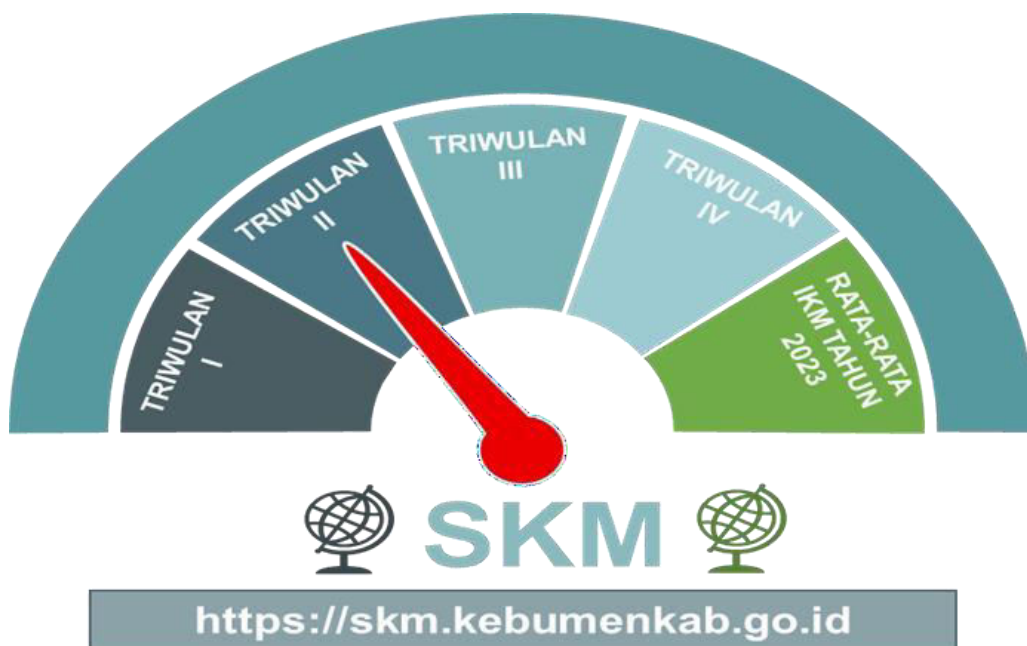
Pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima



LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

TRIWULAN II TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

LAPORAN **1**

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) **1**

DAFTAR ISI **2**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang**1**

1.2 Tujuan dan Manfaat **1**

1.3 Metode Pengumpulan Data **2**

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM **3**

1.5 Penentuan Jumlah Responden **3**

BAB II **4**

ANALISIS DATA SKM **4**

2.1 Analisis Responden **4**

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan **6**

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut **7**

2.4 Tren Nilai SKM**8**

BAB III **10**

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA **10**

BAB IV **12**

KESIMPULAN **12**

LAMPIRAN **14**

1. Kuesioner **14**

2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM) **15**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

2. Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;

4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

3. Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner digital yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yaitu :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

4. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) Triwulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan.

5. Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 4 orang dan sampel sebanyak 4 orang

BAB II

ANALISIS DATA SKM

1. Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 4 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

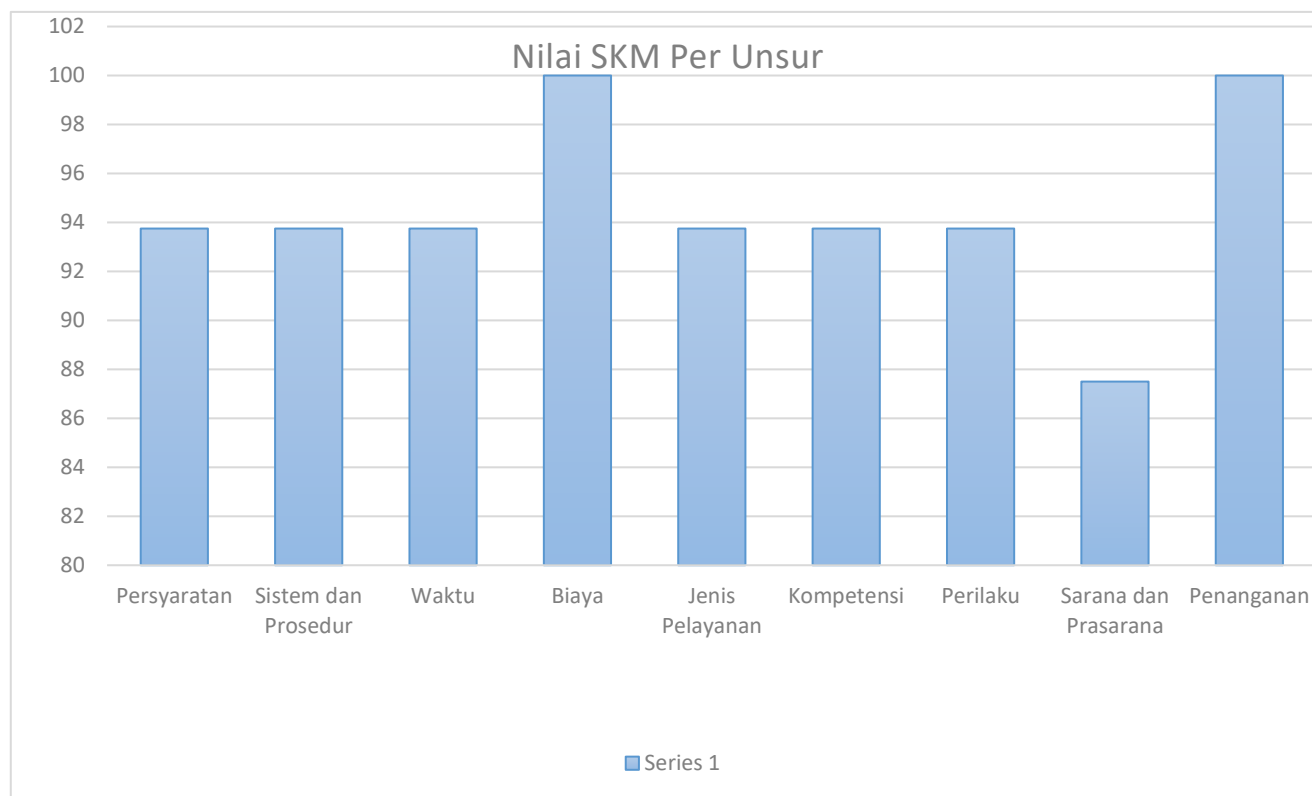
No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	3	0,8%
		Perempuan	1	0,2%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	0	0%
		SMP/Sederajat	0	0%
		SMA/Sederajat	2	0,5%
		D1/D2/D3	0	0%
		D4/S1	1	0,2%
		S2	1	0,2%
		S3	0	0%
3	Usia	<=20	0	0%
		20-29	0	0%
		30-39	2	0,5%
		40-49	2	0,5%
		>=50	0	0%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

[illegible]

17	Pelayanan Musyawarah Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		4	93.75	93.75	93.75	100	93.75	93.75	93.75	87.5	100	93.5
IKM Unit Layanan		93,50										
Mutu Unit Layanan		A										

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



3. Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek Sarana Prasarana dan Persyaratan merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 87,5. Selanjutnya Persyaratan yang mendapatkan nilai 93,75 adalah nilai terendah kedua.

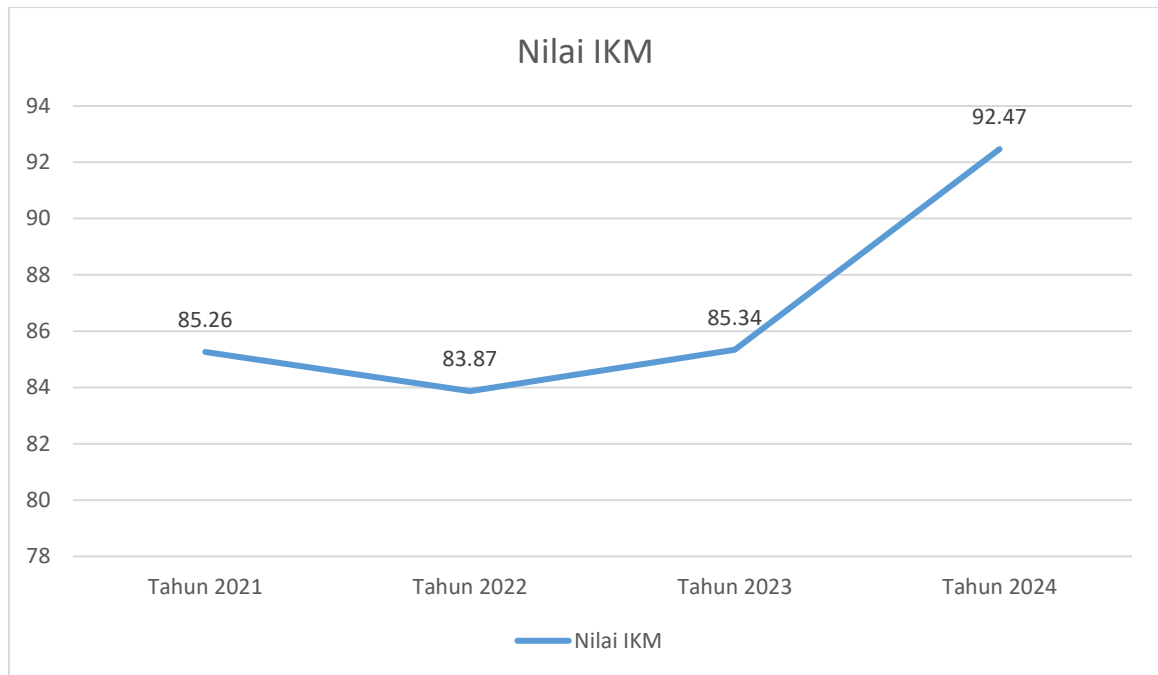
Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa persyaratan layanan dirasa terlalu banyak, rumit, dan terkesan birokratis. Selain itu, terdapat keluhan mengenai sikap petugas yang kurang ramah, tidak komunikatif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan penyederhanaan persyaratan layanan, meningkatkan keterampilan komunikasi petugas, serta memperbaiki alur pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Persyaratan	Menyelenggarakan rapat internal untuk mereviu standar pelayanan	Juli 2025	Sekretariat
2	Sarana dan Prasarana	Membenahi sarana pelayanan dinas	Juli 2025	Sekretariat

4. Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen periode/triwulan (I) menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode/Triwulan I

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	93,75
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	93,75
3	Waktu Penyelesaian	93,75
4	Biaya/Tarif	100
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	93,75
6	Kompetensi Pelaksana	93,75
7	Perilaku Pelaksana	93,75
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	87,5
9	Sarana dan Prasarana	100

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode / Triwulan I. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)
1	Memberikan jaminan kemudahan prosedur sehingga waktu pelayanan lebih efektif dan efisien	Sudah	Melakukan pembaruan standar pelayanan masyarakat setiap tahun
2	Mensosialisasikan persyaratan dan prosedur pelayanan kepada publik melalui media yang mudah diakses	Sudah	Pembuatan dan publikasi informasi terkait alur pelayanan di website
3	Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan ketidak sesuaian antara standar dan implementasi pelayanan akan diperbaiki	Sudah	- Pembuatan standar pelayanan dan mengevaluasi pelayanan publik yang telah diberikan - Perbaikan sarana dan Selesai Laporan Tindak Lanjut Hasil SKM Semester I tahun 2025

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai April hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 4 orang mengisi SKM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen di tahun 2025. Layanan Proses Penyusunan Data Profil Desa menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah *sampel* yang mengisi survei yaitu 1 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93,5. Meskipun demikian, nilai SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana Prasarana dan Persyaratan.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
- Tidak ada tindak lanjut yang belum terselesaikan

Kebumen, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Cokro Aminoto, S.IP, M.Kes
NIP. 196611291987021004

LAMPIRAN

- a. Nilai SKM Triwulan II Tahun 2025
- b. Laporan Per Layanan
- c. Rekapitulasi Responden
 - Jenis Kelamin
 - Usia
 - Pendidikan

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai April hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 4 orang mengisi SKM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen di tahun 2025. Layanan Proses Penyusunan Data Profil Desa menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah *sampel* yang mengisi survei yaitu 1 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93,5. Meskipun demikian, nilai SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana Prasarana dan Persyaratan.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
- Tidak ada tindak lanjut yang belum terselesaikan

Kebumen, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Cokro Aminoto, S.IP, M.Kes
NIP. 196611291987021004

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

UNIT PELAYANAN PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 2 TAHUN 2025

<u>NILAI IKM</u>	<u>RESPONDEN</u>
93.50	Jumlah Responden : 4 orang Jenis Kelamin : Laki-laki = 3 orang : Perempuan = 1 orang Pendidikan : SD = 0 orang : SMP = 0 orang : SMA = 2 orang : DIPLOMA = 0 orang : S1 = 1 orang : S2/S3 = 1 orang : Lainnya = 0 orang

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN

MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI AGAR TERUS

MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

**Rekapitulasi Responden SKM Unit Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Triwulan 2 Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Nama Layanan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	0	0	0
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	0	1	1
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	0	1
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	0	0	0
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	0
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	1	0	1
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	1	0	1
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	0	0
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	0	0	0
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	0	0	0
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	0	0	0
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	0	0	0
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	0
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0
17	Pelayanan Musyawarah Desa	0	0	0
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	0	0
Total Responden		3	1	4

**Rekapitulasi Responden SKM Unit Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Triwulan 2 Tahun 2025 Berdasarkan Usia**

No	Nama Layanan	<=20	20-29	30-39	40-49	>=50	Jumlah
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	0	0	0	0	0	0
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	0	0	0	1	0	1
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	1	0	0	1
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	0	0	0	0	0	0
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	0	0	0	0
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	0	0	0	1	0	1
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	0	0	1	0	0	1
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	0	0	0	0	0
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	0	0	0	0	0	0
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	0	0	0	0	0	0
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	0	0	0	0	0	0
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	0	0	0	0	0	0
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	0	0	0	0
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	0	0	0
17	Pelayanan Musyawarah Desa	0	0	0	0	0	0
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	0	0	0	0	0
Total Responden		0	0	2	2	0	4

**Rekapitulasi Responden SKM Unit Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Triwulan 2 Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan**

No	Nama Layanan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Lainnya	Jumlah
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	1	0	0	0	0	1
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	0	0	1	0	0	0	0	1
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	0	0	0	0	1	0	0	1
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pelayanan Musyawarah Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Responden		0	0	2	0	1	1	0	4

Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan
Pada Unit Penyelenggara Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Triwulan 2 Tahun 2025

No	Nama Layanan	Jumlah Responden	Unsur Pelayanan									Indeks Kepuasan Masyarakat
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	100	100	100	100	100	100	100	75	100	96.25
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	1	75	75	75	100	75	75	75	75	100	79.75
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pelayanan Musyawarah Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		4	93.75	93.75	93.75	100	93.75	93.75	93.75	87.5	100	93.5